

BAB I

PENDAHULUAN

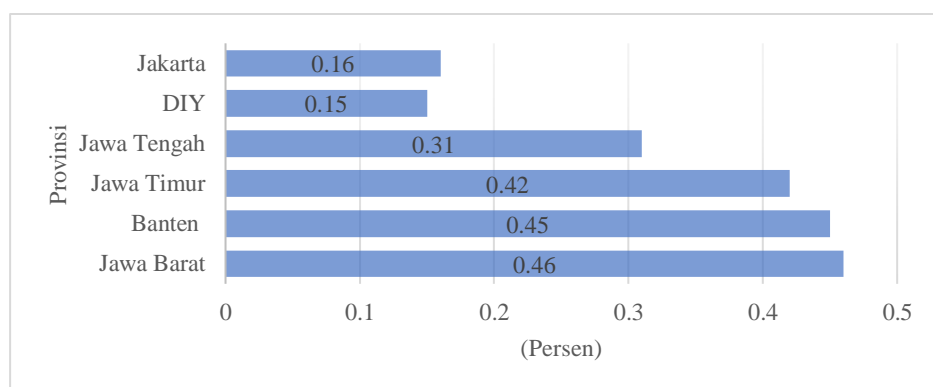
1.1 Latar Belakang

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu indikator kunci dalam menilai kinerja ekonomi suatu negara, karena mencerminkan sejauh mana kegiatan ekonomi mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Hal ini sejalan dengan pandangan Arthur Lewis (1954) bahwa ketenagakerjaan memainkan peran sentral dalam proses pembangunan, karena peningkatan ketenagakerjaan mencerminkan peningkatan kapasitas ekonomi suatu wilayah untuk memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal. Tingginya penyerapan tenaga kerja tidak hanya menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang membaik, tetapi juga menggambarkan kemajuan pembangunan ekonomi yang berkontribusi langsung pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Fitri A et al., 2022).

Tenaga kerja memiliki karakteristik yang beragam, termasuk jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan, kesehatan dan faktor-faktor lainnya. Selain itu juga kualitas tenaga kerja menjadi salah satu aspek penting, karena pekerja dengan pendidikan, keterampilan, dan kesehatan yang lebih baik akan mampu meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan produksi yang berkelanjutan (Khalishah Surend Mahmud & Parianom, 2025).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, isu ketimpangan gender sering muncul sebagai faktor yang memengaruhi kinerja ekonomi. Ketidaksetaraan dalam

akses dan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan dapat menghambat pemanfaatan potensi tenaga kerja secara optimal. Sebaliknya, peningkatan kesetaraan gender diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan partisipasi dan produktivitas tenaga kerja perempuan di berbagai sektor produktif. Akan tetapi perempuan sering kali mengalami berbagai dampak yang terkait dengan ketidakadilan gender. Dampak-dampak tersebut dapat berupa pemutusan hubungan kerja (PHK), berpeluang besar menjadi korban tindak kekerasan, serta menanggung beban ganda saat berada dalam suatu rumah tangga (Huzaimi & Arisetyawan, 2024). Kondisi ketimpangan gender tersebut tercermin dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang masih relatif tinggi di Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Di bawah ini ditunjukkan kondisi indeks ketimpangan gender di Pulau Jawa.



Sumber : (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2025), diolah 2026

Gambar 1. 1 Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Tahun 2024 (persen)

Provinsi Jawa Barat mencatatkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebesar 0,46%, tertinggi di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Nilai ini mencerminkan kesenjangan yang masih signifikan antara laki-laki dan perempuan di Jawa Barat, khususnya dalam hal partisipasi ekonomi, akses terhadap lapangan kerja, dan pemberdayaan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan

pembangunan ekonomi di Jawa Barat belum sepenuhnya diiringi oleh kesempatan yang sama bagi perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Jawa Barat masih menghadapi tantangan dalam menyediakan lapangan kerja karena jumlah penduduknya yang tinggi, persaingan kerja yang ketat, ketimpangan keterampilan dan distribusi lapangan kerja yang belum merata di seluruh wilayah. (Cintia et al., 2022).

Ketimpangan gender yang relatif cukup tinggi berkaitan erat dengan kebijakan yang terbatas, untuk mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Kondisi ini terus menghambat partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja. Kurangnya fasilitas penitipan anak, fleksibilitas kerja yang terbatas, dan kesenjangan upah yang terus-menerus antara laki-laki dan perempuan secara bertahap dapat memperlebar kesenjangan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja. Situasi ini diperburuk oleh norma sosial dan budaya yang masih menempatkan perempuan dalam peran domestik, akses terbatas terhadap pelatihan keterampilan, dan beban ganda dalam mengelola urusan keluarga, sehingga membatasi peluang perempuan untuk memasuki pasar tenaga kerja (Andriani et al., 2025).

Tantangan tersebut semakin terlihat mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk usia kerja belum mendapatkan pekerjaan meskipun secara aktif mencarinya dan peningkatan angkatan kerja belum diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang memadai, sehingga penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat masih belum optimal dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih efektif (Nita Fitriani, 2025).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan bahwa terdapat isu ketidakadilan dalam perlakuan terhadap tenaga kerja perempuan. Asumsi mengenai laki-laki yang dinilai lebih terampil dan cekatan daripada perempuan menjadi faktor penyebab terjadinya kondisi tersebut. Pekerja perempuan sering kali terbatas oleh norma sosial seperti pembagian peran gender yang ada di rumah tangga di mana perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, sedangkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Di samping itu, adanya tuntutan peran ganda dalam rumah tangga menjadi penyebab keterbatasan serta menghambat peluang pekerja perempuan yang mengharuskan perempuan untuk menyeimbangkan antara beban mengurus rumah tangga dengan beban yang dialami pada pekerjaannya (Wandaweka & Purwanti, 2021).

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, mayoritas perempuan lebih memilih pekerjaan yang menawarkan fleksibilitas waktu agar dapat menyeimbangkan peran ganda yang dimiliki, salah satunya berpartisipasi pada pekerjaan sektor informal. Di bawah ini dapat dilihat gambar perbandingan kondisi jumlah tenaga kerja perempuan pada sektor formal dan informal di Jawa Barat beberapa tahun terakhir



Sumber: (Badan Pusat Statistik Jawa Barat., 2025), diolah 2026

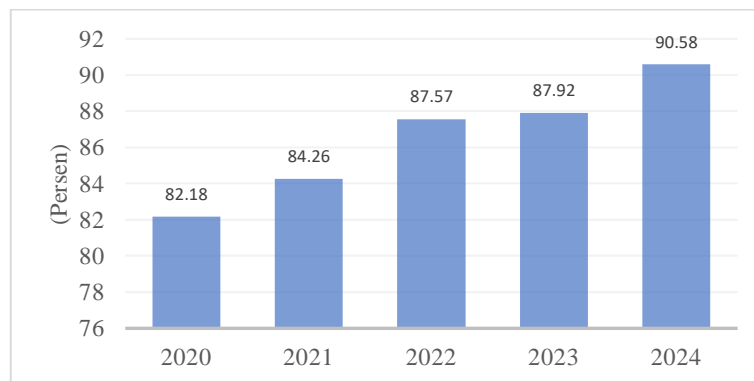
**Gambar 1. 2 Tenaga Kerja Perempuan Sektor Formal dan Informal
2020-2024**

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan penyerapan tenaga kerja perempuan dari tahun 2020–2024 menunjukkan sektor informal tetap dominan dibandingkan sektor formal, terutama selama krisis dan pemulihan ekonomi Covid-19. Pada tahun 2020, jumlah pekerja perempuan di sektor informal 1.455 orang lebih tinggi daripada di sektor formal 396 orang, mencerminkan terbatasnya akses perempuan terhadap pekerjaan formal akibat pandemi. Periode 2021 hingga 2023 menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pekerja perempuan di sektor informal, sementara sektor formal cenderung tetap dan berfluktuasi, menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi belum sepenuhnya diiringi oleh perluasan kesempatan kerja formal bagi perempuan. Pada tahun 2024, terjadi penurunan jumlah pekerja perempuan di sektor informal menjadi 4.162, disertai dengan peningkatan di sektor formal menjadi 3.408, menunjukkan pergeseran sebagian pekerja perempuan ke sektor formal. Secara keseluruhan, fenomena ini menegaskan bahwa sektor informal tetap menjadi sumber utama penyerapan tenaga kerja perempuan, tetapi juga menunjukkan perlunya kebijakan dan faktor pendukung pembangunan, khususnya

dalam menghadapi ketidaksetaraan gender dan terbatasnya kesempatan kerja. (Wandaweka & Purwanti, 2021).

Meskipun sektor informal menyediakan peluang kerja cukup besar, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan. Sebagian besar pekerja perempuan di sektor informal menghadapi kondisi kerja yang rentan, seperti upah yang relatif rendah, kurangnya jaminan sosial, minimnya keamanan kerja, dan risiko eksploitasi yang tinggi. Pekerja perempuan di sektor informal umumnya kurang mendapat perlindungan dari peraturan ketenagakerjaan formal, sehingga mereka lebih rentan terhadap diskriminasi, pelecehan, dan beban kerja yang tidak seimbang. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan posisi mereka di pasar tenaga kerja (Andriani et al., 2025).

Dalam perkembangan ekonomi saat ini, tantangan tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi semakin kompleks dengan hadirnya digitalisasi. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara produksi dan distribusi, tetapi juga menentukan kemampuan tenaga kerja bertahan dan beradaptasi di tengah persaingan ekonomi. Perkembangan teknologi seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, dan platform digital mendorong munculnya pola kerja baru yang semakin bergantung pada konektivitas internet (Prasektianto, 2025). Kondisi tersebut dapat dilihat dalam gambar grafik di bawah ini.



Sumber: (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025c), diolah 2026

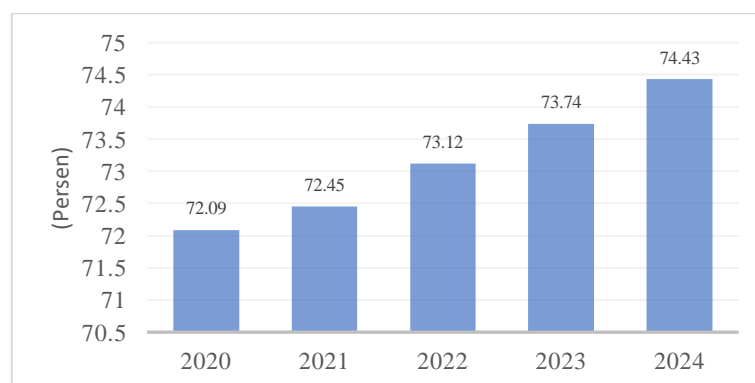
Gambar 1. 3 Pengguna Internet Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Persen)

Pada Gambar 1.3 menunjukkan pengguna internet di Jawa Barat terus menerus mengalami peningkatan dari tahun 2020 berada pada angka 82,18% hingga pada tahun 2024 mencapai 90,58%.

Dengan jumlah pengguna internet yang terus mengalami peningkatan, ini menggambarkan masyarakat Jawa Barat semakin terbiasa memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari pekerjaan dan pendidikan hingga transaksi ekonomi. Kehadiran internet mampu mewujudkan pemberdayaan perempuan dan penyerapan tenaga kerja makin baik. Internet memberikan peluang besar dalam peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan. Namun, peningkatan jumlah pengguna internet belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas penggunaannya, khususnya di kalangan pekerja perempuan di sektor informal. Terlepas dari semakin meluasnya akses internet, pendidikan yang terbatas, keterampilan digital, dan kerentanan struktural yang telah lama ada di kalangan pekerja perempuan di sektor informal berarti bahwa peluang digitalisasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan lapangan kerja dan kualitas pekerjaan mereka (Aryeh-Adjei et al., 2025). Tren ini penting untuk

diperhatikan karena pertumbuhan adopsi internet berpotensi mengubah kebutuhan pasar kerja, di mana permintaan tenaga kerja semakin bergeser ke bidang-bidang berbasis digital. Dengan demikian, penggunaan internet tidak hanya mendorong perluasan lapangan kerja tetapi juga menimbulkan tantangan terkait kesenjangan keterampilan digital dalam angkatan kerja (Irawan et al., 2025).

Perkembangan digital sangat berkaitan erat dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup yang layak diharapkan mampu memperkuat daya saing tenaga kerja, termasuk di sektor informal. Oleh karena itu, perkembangan IPM menjadi penting untuk di perhatikan. Di bawah ini merupakan gambar yang menunjukkan kondisi IPM Jawa Barat.



Sumber : (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025b), diolah 2026

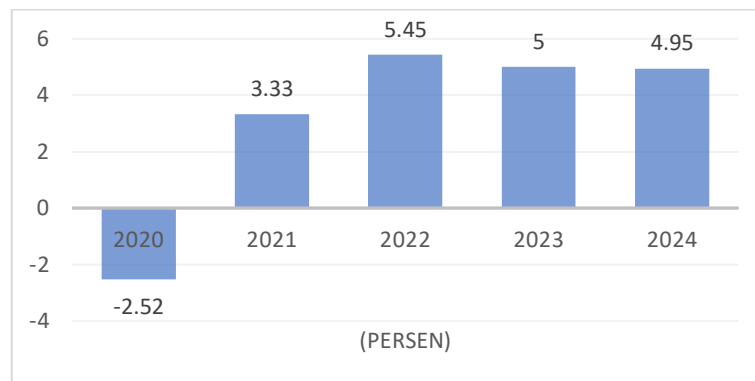
Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat Tahun 2020-2024

Gambar 1.4 menunjukkan IPM Jawa Barat terus meningkat sepanjang periode 2020 di angka 72,09 hingga pada tahun 2024 IPM Jawa Barat mencapai 74,43. Tren peningkatan yang konsisten menunjukkan bahwa upaya pembangunan di Jawa Barat relatif berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, nilai IPM yang berada pada kategori tinggi ini masih memerlukan

perhatian, terutama untuk memastikan pemerataan kualitas pembangunan di seluruh wilayah di provinsi ini (Nur Ayda et al., 2025).

Secara teoritis peningkatan IPM seharusnya diikuti oleh peningkatan tenaga kerja karena sumber daya manusia yang lebih terdidik dan sehat memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan. Peningkatan IPM di Jawa Barat seharusnya menjadi indikator positif untuk peningkatan kapasitas dan kualitas angkatan kerja. Namun, meskipun IPM Jawa Barat meningkat, persoalan terkait tenaga kerja masih muncul seperti terbatasnya lapangan kerja perempuan, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, ketimpangan gender, serta distribusi kesempatan kerja yang tidak merata. Dengan demikian IPM yang terus meningkat seharusnya menjadi lebih baik, namun jika pertumbuhan kesempatan kerja tidak mampu mengikuti jumlah pencari kerja termasuk perempuan di sektor informal, maka pengangguran tetap akan terjadi meskipun kualitas manusia semakin meningkat (Hafiz et al., 2021). Hal tersebut sejalan dengan teori Human Capital yang menjelaskan bahwa peningkatan kualitas dan keterampilan akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi (M Hasan et al., 2023).

Dalam konteks Pembangunan ekonomi, tenaga kerja tidak hanya di pandang dari sumber daya manusia saja, tetapi juga sebagai faktor produksi yang secara signifikan mempengaruhi output dan pertumbuhan ekonomi (Yanuar Rizki et al., 2025). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Di bawah ini merupakan gambar yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi tahunan di Jawa Barat.



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2025, diolah 2026

Gambar 1. 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Tahun (Persen) 2020-2024

Pada Gambar 1.6 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menunjukkan tren penurunan tajam pada tahun 2020 menjadi -2,52% akibat dampak pandemi, namun Kembali membaik pada tahun 2021 dengan laju pertumbuhan 3,33% dan mencapai puncaknya di angka 5,45% pada tahun 2022 seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi. Pada tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan sedikit melambat menjadi 5,00% dan kembali mengalami penurunan menjadi 4,95% akibat dampak melemahnya permintaan global dan proses penyesuaian pasca-pemulihan, sehingga perekonomian Jawa Barat tetap berada dalam kondisi tetap tumbuh meskipun melamban.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi berpotensi memperlebar kesenjangan gender di pasar tenaga kerja. Pekerja perempuan sering menghadapi beban ganda tanggung jawab domestik dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, dalam perekonomian yang melemah, mereka cenderung lebih rentan untuk dikeluarkan dari pasar tenaga kerja, khususnya dari pekerjaan formal yang membutuhkan stabilitas dan jam kerja tetap. Kondisi ini mendorong lebih banyak perempuan ke sektor informal, yang menawarkan tingkat perlindungan dan tunjangan kerja yang

lebih rendah. Penurunan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berdampak pada kinerja ekonomi regional tetapi juga menunjukkan semakin terbatasnya kesempatan kerja yang setara bagi perempuan dan menuntut kebijakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut mendorong perluasan kesempatan kerja serta pemerataan distribusi pendapatan, pengurangan disparitas antarwilayah, serta pembentukan struktur ekonomi yang lebih stabil merupakan langkah-langkah penting menuju pembangunan berkelanjutan (Sofiah et al., 2024). Sejalan dengan teori pertumbuhan Neo-klasik yang di kembangkan oleh Solow dan Swan (1956) serta trigian (2014) dalam jurnal (Purba & Damanik, 2024) yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi yang saling terikat dalam proses menghasilkan output, sehingga pertumbuhan ekonomi akan cenderung pada kondisi kesempatan kerja penuh.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya ketidaksesuaian dalam pembangunan lapangan kerja di Provinsi Jawa Barat. Di satu sisi, peningkatan IPM, digitalisasi yang pesat, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menunjukkan kemajuan. Namun, di sisi lain, penyerapan tenaga kerja perempuan masih didominasi oleh sektor informal yang rentan, dengan tingkat perlindungan dan kesejahteraan yang rendah, dan ditandai dengan indeks ketimpangan gender yang tinggi. kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya

menciptakan kesempatan kerja yang setara dan berkualitas bagi perempuan.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai penyerapan tenaga kerja perempuan umumnya berfokus pada faktor-faktor mikro atau karakteristik individu, seperti tingkat upah, jumlah tanggungan, tingkat pendidikan, usia, dan status demografis lainnya. Meskipun penting, pendekatan ini belum sepenuhnya menangkap pengaruh faktor makro dan struktural pembangunan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin memfokuskan dengan menggunakan variabel makro umum yaitu digitalisasi, IPM, dan pertumbuhan ekonomi tetapi menganalisis dampaknya secara khusus pada penyerapan tenaga kerja perempuan di sektor informal di Provinsi Jawa Barat. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana dinamika pembangunan dan transformasi ekonomi memengaruhi posisi perempuan di pasar tenaga kerja, yang masih relatif terbatas dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi, IPM, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja perempuan di sektor informal di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja perempuan dan menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan setara gender. Oleh karena itu, studi ini disusun dengan judul **Analisis Pengaruh Digitalisasi, IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Perempuan pada Sektor Informal di Jawa Barat Tahun 2008-2024.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh digitalisasi, IPM dan pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja perempuan pada sektor informal di Jawa Barat tahun 2008-2024?
2. Bagaimana pengaruh digitalisasi, IPM dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja perempuan pada sektor informal di Jawa Barat tahun 2008-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi, IPM dan pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja perempuan pada sektor informal di Jawa Barat tahun 2008-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi, IPM dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja perempuan pada sektor informal di Jawa Barat tahun 2008-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak terkait. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sarana untuk menerapkan teori dan metode analisis ekonomi pembangunan dan ketenagakerjaan secara empiris, khususnya dalam menganalisis penyerapan tenaga kerja perempuan di sektor informal, serta meningkatkan kemampuan akademik dan pemahaman penulis terhadap ketenagakerjaan regional

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta penguatan literasi dan keterampilan digital bagi perempuan guna mendorong penyerapan tenaga kerja perempuan di sektor informal.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat menambah referensi ilmiah dan bahan kajian bagi perguruan tinggi, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan dan ketenagakerjaan, serta dapat digunakan sebagai rujukan bagi mahasiswa dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi pembangunan dan ketenagakerjaan, khususnya mengenai penyerapan tenaga kerja di sektor informal. Dengan menggunakan variabel

digitalisasi, IPM, dan pertumbuhan ekonomi dalam satu pendekatan empiris, penelitian ini memberikan sudut pandang baru dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja perempuan di sektor informal. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja perempuan pada sektor informal di Jawa Barat. Oleh karena itu penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat, dalam hal penulisan melakukan penelitian menggunakan data sekunder, yaitu publikasi dari pihak terpercaya antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Open Data Jabar dan jurnal-jurnal *online*.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat sebagai matriks acuan agar penelitian dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

